

ANALISIS KINERJA PROGRAM BANTUAN PINJAMAN LANGSUNG MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA PESANTREN DI MADURA

Performance Analysis of Community Block Grant Through Pesantren in Madura

Farahdilla Kutsiyah¹, Muslich Mustadjab², Ratya Anindita², dan Ahmad Erani Yustika²

¹Fakultas Pertanian Universitas Madura, Jl. Panglegur Km 3,5 Pamekasan, Madura

²Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang

¹E-mail: dilla.farah@yahoo.co.id

ABSTRACT

This article analyzed the performance of community direct block grant (BPLM) disbursed through the *pesantren* (boarding school) using institutional economic theory approach. The approach involved in examining of contract participation, social capital, transaction cost, and income. This research was conducted at two *pesantrens* in Madura Island. The sample was taken using cluster random sampling method. The research showed that the social capitals of the pesantren are consisted by a blessed value system (*barokah*), obedience, honesty, and solid network between the farmers and the *pesantrens*. The capital was rooted in farmer's lifestyles which influence the operation of the pesantren economic activity. Meanwhile, the transaction cost was depending on how the farmers organize the BPLM that influenced by each pesantren's characters as reflected by typical governance structure, behavioral attributes of the farmers/chairperson of the farmer's group, *pesantren's* networking, and uncertainty. The execution costs are the major contribution to the total transaction costs. The increasing of the transaction costs will be followed by the significantly decreasing of the farmer's income.

Key words : *pesantren, BPLM, social capital, transaction costs.*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis kinerja program bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM) yang disalurkan melalui lembaga pesantren. Pendekatan teori ekonomi kelembagaan digunakan untuk menganalisis kinerja program ini, yang mencakup partisipasi kontrak, modal sosial, biaya transaksi, dan pendapatan. Penelitian ini dilaksanakan pada dua pesantren di Pulau Madura. Pengambilan contoh menggunakan metode *cluster random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial pesantren adalah tata nilai barokah, kepatuhan, jujur, dan jaringan yang solid antara petani dan pesantren. Modal sosial tersebut mengakar dalam kehidupan petani dan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ekonomi pesantren. Sementara, biaya transaksi petani dalam pelaksanaan BPLM tergantung pada operasional kelembagaan masing-masing pesantren, yang disebabkan oleh perbedaan struktur tata kelola, perilaku petani/ketua kelompok, jaringan pesantren, dan ketidakpastian. Adapun biaya eksekusi

ANALISIS KINERJA PROGRAM BANTUAN PINJAMAN LANGSUNG MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA PESANTREN DI MADURA Farahdilla Kutsiyati, Muslich Mustadjab, Ratya Anindita, dan Ahmad Erani Yustika

memberi kontribusi yang paling tinggi terhadap total biaya transaksi. Kenaikan biaya transaksi ini akan diikuti dengan penurunan secara nyata pendapatan petani.

Kata kunci : *pesantren, BPLM, modal sosial, biaya transaksi*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pesantren merupakan lembaga keagamaan yang menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai islami. Data statistik mencatat, terdapat 14.067 pesantren di Indonesia dengan 30.000 kiai dan 3,1 juta santri pada tahun 2003 (Depag, 2004a; Kompas, 2004). Tahun 2005 meningkat sekitar 17.000 pesantren (Ridwan, 2005).

Keberadaan lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menunjukkan keterlibatannya dalam menangani masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat (Ghazali, 2001). Dengan kata lain, pesantren harus mandiri dan bisa membantu persoalan-persoalan ekonomi masyarakat, serta keberadaannya tidak boleh membebani umat tetapi memberi kemaslahatan (kebaikan) bagi umat.

Tugas mulia pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendapat sambutan dan bantuan pemerintah. Bantuan ini secara yuridis dipicu terbitnya surat keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama Tahun 1991 tentang pengembangan agribisnis di pesantren. Tahun anggaran 1997/1998, Departemen Koperasi melaksanakan Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER) (Syahyuti, 1999; Depag, 2004b). Tahun 2006 Kepmenkop menyalurkan P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi Usaha Mikro) (Bisnis Indonesia, 2007), sedangkan Departemen Pertanian melanjutkan PPA (Program Pengembangan Agribisnis) (Deptan, 2006).

PPA peternakan dengan pola fasilitas bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM), merupakan program subsektor peternakan sebagai bagian dari upaya operasionalisasi keberpihakan pemerintah kepada petani. Tujuan program ini secara umum adalah (1) memperkuat modal pelaku agribisnis dalam mengembangkan usaha agribisnis dan ketahanan pangan, (2) meningkatkan produksi dan produktivitas usaha agribisnis dan pendapatan pelaku agribisnis, (3) meningkatkan kemandirian dan kerja sama kelompok, dan (4) mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya (Deptan-UB, 2004).

Wilayah penerima program BPLM mencakup seluruh Indonesia. Jawa Timur, lebih spesifiknya Pulau Madura, termasuk yang dipilih dengan kelompok sasaran penerimanya adalah pesantren. Seperti diketahui bersama, citra

Madura sebagai masyarakat santri “sangat kuat”, sehingga tidak sulit menemukan pesantren di daerah perdesaan pulau Madura. Ketika mengitari pulau ini, terutama di daerah perdesaan, pesantren bertebaran di mana-mana.

Pengembangan agribisnis sapi potong merupakan salah satu program BPLM. Mekanismenya, dana bantuan pinjaman ditransfer langsung ke rekening ketua kelompok sasaran (dalam hal ini ketua kelompok yang dibentuk oleh pesantren). Dengan demikian, pengelolaan dana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kelompok sasaran. Kemudian, ketua kelompok dan pengurus menyalurkan ke masyarakat. Oleh karena itu, aturan main seperti kontrak, sistem nilai, norma, organisasi, dan prosedur penegakan yang dilakukan terhadap petani sepenuhnya menjadi wewenang pesantren. Tugas pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan hanya sebatas memberi pembinaan dan evaluasi agar kewajiban pesantren sesuai kontrak yang telah disepakati diantara keduanya, serta memberi arahan agar sedapat mungkin sesuai petunjuk teknis (Juknis) dan pedoman umum yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan BPLM ini telah memberi banyak dampak positif, baik langsung atau tidak langsung, tetapi iapun tidak luput pula dari hambatan yang melingkupi, antara lain tidak semua pesantren dapat sepenuhnya merealisasikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kontrak.

Masalah-masalah umum yang sering ditemukan untuk pengembangan ekonomi pesantren dalam bidang agribisnis adalah (1) potensi sumberdaya manusia, manajemen dan teknologi yang diterapkan masih kurang optimal, model pengembangan belum spesifik dengan lokasi pesantren, permodalan terbatas dan kesulitan mendapat akses permodalan (Depag, 2004a); (2) aturan main, seperti aturan formal, aturan informal, dan mekanisme penegakan yang mengitarinya kurang mendukung (Kutsiyah, 2008). Namun, dapat ditarik benang merah bahwa masalah yang dominan pada program BPLM ini, yakni aturan main (*rules of the game*) yang diterapkan pesantren kurang efisien, yang dapat dibuktikan dari kenyataan dalam pelaksanaannya.

Bertitik tolak pada pemaparan di atas, terdapat dua permasalahan yang ingin dijawab dalam makalah ini; yakni menganalisis kontribusi modal sosial pesantren terhadap pelaksanaan program BPLM, dan pengaruh kesepakatan kelembagaan terhadap biaya transaksi (biaya untuk menjalankan sistem ekonomi) petani BPLM.

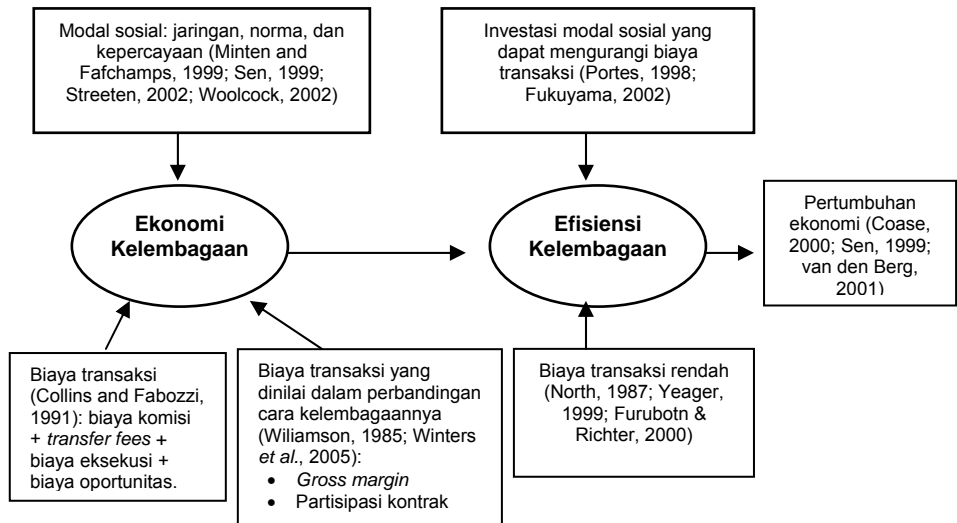
METODOLOGI PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Efisiensi kelembagaan adalah salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kelembagaan dinilai efisiensi, jika biaya transaksi rendah (Yeager, 1999; Berg, 2001; North, 1987; Furubotn dan Richter, 2000),

ANALISIS KINERJA PROGRAM BANTUAN PINJAMAN LANGSUNG MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA PESANTREN DI MADURA Farahdilla Kutsiyati, Muslich Mustadjab, Ratya Anindita, dan Ahmad Erani Yustika

dan modal sosial berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi (Lapavitsas dan Fine, 2004; Isham *et al.*, 2002; Streeten, 2002). Untuk lebih jelasnya, skematis kerangka teoritis dalam memecahkan masalah penelitian ini disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Teoritis Pendekatan Ekonomi Kelembagaan dalam upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Definisi biaya transaksi dalam penelitian ini merujuk pada Arrow (1969) (dalam Williamson 1985), yaitu biaya untuk berjalannya pelaksanaan sistem ekonomi. Sedangkan analisisnya mengacu pada metodologi pengukuran biaya transaksi (Collins dan Fabozzi, 1991), yang dirumuskan sebagai penjumlahan biaya komisi (*commisions*), *transfer fees*, biaya eksekusi (*execution costs*), dan biaya pendugaan (*opportunity costs*). Sementara, penentu biaya transaksi mencakup struktur tata kelola, atribut perilaku dari pelaku, lingkungan kelembagaan, dan atribut transaksi (Milgrom dan Robert, 1992; Lin, 1997; Furubotn dan Richter, 2000; Schramm, 2000; Williamson, 1985).

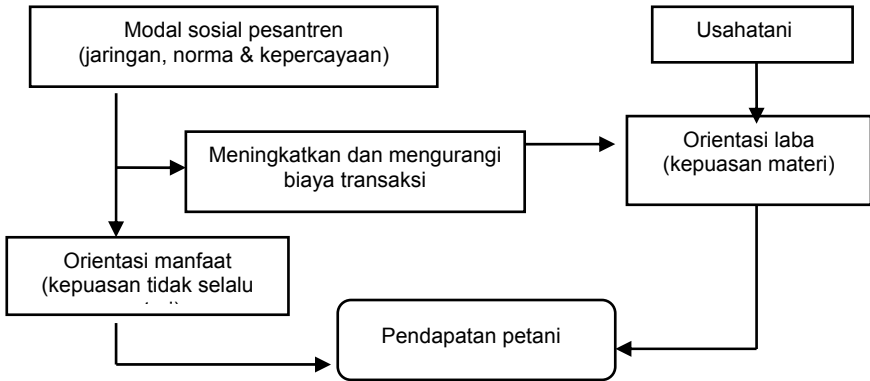
Adapun definisi modal sosial dalam penelitian ini adalah norma, kepercayaan, dan jaringan yang terlekat dalam struktur sosial masyarakat yang dapat memfasilitasi tindakan kolektif untuk hubungan yang saling menguntungkan (dirangkum dari pendapat Portes, 1998; Minten and Fafchamps, 1999; Putnam *et al.*, dalam Wallis *et al.*, 2004). Meskipun begitu, Lapavitsas dan Fine (2004) menyebutkan, efek modal sosial dapat positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menggambarkan kontribusi modal sosial pesantren terhadap pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini merunut pada tiga peubah tersebut.

Dalam penelitian ini cara yang digunakan adalah pendekatan modal sosial dan biaya transaksi, karena inti dasar dari “kelembagaan” adalah bagaimana aturan formal (kontrak, organisasi, hukum, sistem politik, pasar), aturan informal (sistem nilai, norma, tradisi, agama, kebiasaan) dan mekanisme penegakan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pada kenyataannya, kegiatan ekonomi pesantren terikat dengan struktur sosialnya, artinya struktur sosial pesantren mempengaruhi perilaku para pelaku ekonomi dalam memperoleh manfaat dan tambahan materi yang diinginkan. Mengutip pernyataan Sen (2007), sangat penting memasukkan persepsi dan pemahaman tentang identitas bersama, serta ketaatan terhadap norma kedalam karakterisasi pilihan dan perilaku dalam ilmu ekonomi; atau merunut istilah yang sering dipaparkan dalam teori ekonomi kelembagaan bahwa sebuah kemustahilan apabila memahami ekonomi terpisah dari nilai-nilai budaya, norma, dan struktur sosial masyarakat (Fukuyama, 2002; Damsar, 2002; Nooteboom 1998; Kunio, 2000; Coase, 2002; Coleman, 1990; dalam Lapavitsas *et al.*, 2004). Ketika ketiga elemen tersebut mendukung kegiatan negosiasi, pengawasan, pengukuran, dan pelaksanaan pertukaran, maka biaya transaksi dapat ditekan seminimal mungkin. Sebaliknya, jika biaya transaksi tinggi akibat kelangkaan informasi maka perdagangan tidak akan terjadi dan ekonomi menjadi status, hak kepemilikan kurang terlindungi, dan mekanisme penegakan kesepakatan tidak efektif, sehingga terjadi banyak penyimpangan (Yeager, 1999; North, 1987; Furubotn dan Richter, 2000; Isham *et al.*, 2002; Milgrom dan Robert, 1992; Lin, 2001; Williamson, 1990).

Sementara, karakteristik pesantren ditinjau dari aspek historis selalu terikat dengan nilai-nilai keislaman dan keaslian (*indigenous*) corak Indonesia. Hingga saat ini, pesantren dianggap sebagai suatu *sub-culture* yang unik, dengan cakupan ciri-ciri yang melekat: (1) Orientasi kuat terhadap kiai (Luqman, 2003; Aldi *et al.*, 2002). Dalam tradisi pesantren, guru dianggap sebagai penyalur barokah dan tercerminnya kepatuhan absolut kepada seorang guru (Dhofier, 1982). (2) Sifat tertutup dan solidaritas yang tinggi antara sesama pesantren (Wahid, 1988). (3) Wawasan terbatas, spesialisasi tidak berkembang (Billah, 1985). (4) Kedudukan terpenting dalam tata nilainya adalah pencapaian penerimaan di sisi Allah (Wahid, 1988). (5) Masyarakat lingkungannya umumnya di perdesaan dengan pengikut utama kaum petani dan pedagang (Rahardjo, 1988). (6) Watak pribadi seperti kemandirian, kesederhanaan, dan kesetiakawanan (Billah, 1985). (7) Jaringan nya cukup solid (Farchan dan Syarifudin, 2005).

Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, karakteristik yang dimiliki pesantren tersebut akan memengaruhi struktur sosial dan interaksi sosial keluarga pesantren, dan dalam struktur sosialnya terlekat modal sosial pesantren. Setelah kurun waktu lama, akhirnya melembaga dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pesantren. Di mana “orientasi modal sosial” tersebut bagi masyarakat di satu sisi lebih condong pada “manfaat (*benefit*)” yang ingin didapatkan, artinya kepuasan (*utilitas*) tidak selalu materi

yang diutamakan. Modal sosial pesantren dapat meningkatkan atau mengurangi biaya transaksi. Pada sisi lain, usaha tani tentu berorientasi untuk mendapat laba. Berdasarkan perpaduan orientasi manfaat dan laba dimaksud, pendapatan petani akan terpengaruh (lihat gambar 2).



Gambar 2. Kaitan Modal Sosial Pesantren, Biaya Transaksi dan Pendapatan

Gambar tersebut, merujuk pada teori rasionalitas yang dikemukakan Coleman (dalam Ritzer dan Goodman, 2004).. Gagasan dasarnya adalah bahwa "tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai/norma atau pilihan (*preferensi*).

Oleh karena itu, keberadaan kelembagaan ekonomi pesantren akan mempunyai implikasi positif bagi pengembangan agribisnis, apabila kelembagaannya efisien. Kelembagaan ekonomi pesantren dikatakan efisien jika biaya transaksinya rendah dan investasi modal sosial pesantren dapat mengurangi biaya transaksi, sehingga pendapatan petani BPLM akhirnya meningkat.

Sebagai penjelasan, program BPLM memiliki dua manfaat. *Pertama*, petani memperoleh pinjaman dana pembelian bibit dari pemerintah yang difasilitasi melalui pesantren. *Kedua*, terikat dengan kelembagaan pesantren yang mencakup kontrak, insentif, sistem nilai, norma, organisasi, dan mekanisme penegakan, di mana "kompensasi" keterikatan kontrak/kesepakatan petani BPLM dengan pesantren adalah insentif dalam bentuk bagi hasil dari keuntungan, fasilitas kredit, fasilitas pengobatan, akses informasi, dan melindungi investasi petani karena kecenderungan biaya transaksi tinggi akibat ketidakpastian penawaran, harga dan musim. Dengan kata lain, adanya kelembagaan pesantren sebagai fasilitator BPLM diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan program pengembangan agribisnis, yang direfleksikan dalam bentuk peningkatan pendapatan petani BPLM.

Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama tiga belas bulan, dimulai pada bulan November 2006 sampai Desember 2007. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Palengaan dan Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan-Madura, yang mendapat BPLM sejak akhir tahun 2004. Dari penelusuran informasi diketahui jumlah penerima BPLM periode 2004-2005 hanya tiga pesantren dan dalam penelitian ini sengaja dipilih dua pesantren, karena memiliki dua perbedaan dari aspek jumlah santri dan pengaruh terhadap masyarakat, yakni pesantren Sumber Bungur (SB), Kecamatan Pakong, dan Pesantren Darul Ulum (DU), Kecamatan Palengaan. Pesantren DU termasuk kategori pesantren "besar" di Pulau Madura, terutama sekali di Kabupaten Pamekasan. Pengaruh dan jaringannya cukup luas sampai ke Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. Jumlah santrinya mencapai 4.241 santri pada tahun 2008. Sementara, Pesantren SB termasuk kategori pesantren "sedang" dengan jumlah santri hanya sekitar 500. Pengaruh dan jaringannya tidak terlalu luas atau dapat dikatakan masih dalam lingkup Kecamatan Pakong dan sebagian wilayah Kabupaten Pamekasan.

Penentuan Contoh

Populasi dalam penelitian ini adalah petani BPLM dan petani non-BPLM. Petani BPLM adalah para penggaduh yang dipilih pesantren untuk mendapatkan bantuan sapi, fasilitas kredit, akses informasi/jaringan pesantren, pengobatan gratis, dan pembinaan. Sementara, petani non-BPLM adalah petani yang memelihara sapi, baik sapi milik sendiri dan atau menggaduh sapi milik orang lain, tetapi bukan milik pesantren, serta mereka tidak mendapatkan fasilitas seperti yang diterima petani BPLM.

Contoh dipilih dengan metode acak kelompok. Pendekatan ini bermanfaat untuk menjamin ragam pada setiap kelompok (dusun), meskipun ragam antarkelompok relatif sama. Tahapan pengambilan contoh adalah sebagai berikut: (1) Lokasi desa petani BPLM (sebagai keterangan, tidak semua desa dari kecamatan dimaksud memperoleh BPLM). Walaupun pesantren DU terletak di Kecamatan Palengaan, tetapi petani yang terpilih dapat berada di luar kecamatan ini, bahkan ada pula yang tinggal di Kabupaten Sumenep, dan sebagian besar berada di Kecamatan Pakong (faktor yang melatar belakangi adalah tempat tinggal ketua kelompok berada di kecamatan tersebut). (2) Lokasi dusun petani BPLM.

Dalam penelitian ini diambil contoh sebanyak 131 petani secara sengaja, dengan rincian petani BPLM 73 orang, masing-masing petani BPLM (SB) dan (DU), yakni 48 dan 25 orang. Sedangkan petani non-BPLM 58 orang. Jumlah proporsi sampel petani BPLM mewakili 25,6 persen dari unit total populasi. Sebagai penjelasan, jumlah petani BPLM (DU) sebanyak 85 orang, dengan jumlah sapi yang dipelihara 101 ekor. Anggota kelompok petani BPLM (DU) ini terdiri atas alumni, nonalumni, dan 28,2 persen berstatus santri yang

masih aktif bersekolah dan sekaligus diberi tanggung jawab merawat 1-2 ekor/orang yang ditampung dalam kandang kolektif untuk pesantren. Sedangkan jumlah petani BPLM (SB) 100 orang dan sapi yang dipelihara sebanyak 100 ekor.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan cara (i) wawancara dengan kuisisioner; (ii) wawancara secara bebas (*In-depth interview*) terhadap petani, santri, kiai, ustad, petugas dinas peternakan, dan ketua kelompok/pengurus; (iii) pengamatan jarak dekat, mengamati sebagian kegiatan program pengembangan sapi potong; (iv) dokumentasi serta mengumpulkan data sekunder dari instansi-instansi Depag, Dispet, Balitbangda Kabupaten Pamekasan dan Provinsi Jawa timur.

Analisis Data

Pendekatan teori ekonomi kelembagaan digunakan untuk menganalisis kinerja BPLM, yang mencakup partisipasi kontrak, modal sosial, biaya transaksi, dan pendapatan petani. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, regresi logistik, dan tabulasi silang.

Keputusan Partisipasi terhadap BPLM

Pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan partisipasi terhadap BPLM menggunakan regresi logistik. Pengujian ini untuk mengetahui persyaratan dan faktor pertimbangan lainnya yang ditetapkan pesantren (*principal*) dalam pemilihan petani (*agent*). Artinya, analisis *logit* digunakan untuk menguji partisipasi terhadap BPLM (kemungkinan/probabilitas partisipasi terhadap BPLM). Rumusan matematisnya sebagai berikut:

$$Li = \ln \left[\frac{SPK}{1-SPK} \right] = \alpha_0 + \beta_1 Kpm + \beta_2 Bhs + \beta_3 Llh + \beta_4 Pgm + \beta_5 umur + \beta_6 Lpd + \beta_7 Agk + \beta_7 Kkd + \alpha_1 Rpt + \alpha_2 Jsk + \alpha_3 Kmb + \alpha_4 Hps + \epsilon_1 \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

- L_i = Log dari *odds ratio* keputusan partisipasi terhadap BPLM
- SPK_i = Peluang petani BPLM dan (1- SPK_i) untuk peluang petani non-BPLM
- Kpm = Kepemilikan sapi (ekor)
- Bhs = Sistem bagi hasil (%)
- Llh = Kepemilikan lahan (m²)
- Pgm = Pengalaman beternak sapi (tahun)
- Umur = Umur (tahun)
- Lpd = Lama di pesantren (tahun)
- Agk = Jumlah anggota keluarga (orang)
- Kkd = Kapasitas kandang (ekor)

- Rpt = 1 jika reputasi petani tidak pernah bermasalah dalam bermuamalah dan 0 jika pernah bermasalah dalam bermuamalah
- Jsk = 1 jika jenis kelamin lak-laki dan 0 jika wanita
- Kmb = 1 jika pendidikannya lulus SD dan atau jenjang pendidikan lebih tinggi dan 0 jika tidak tamat SD dan atau tidak pernah sekolah
- Hps = 1 jika hubungan petani dengan pesantren sebagai santri/wali santri dan 0 jika bukan santri/ wali santri
- β_1, \dots, β_7 dan $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ = koefisien regresi
- ε_1 = error.

Modal Sosial

Modal sosial digambarkan dari jaringan, norma, dan kepercayaan pesantren. Jaringan mencakup pengajian dan keeratan hubungan petani dengan pesantren. Analisis pendahuluan menunjukkan bahwa jaringan dapat diukur dari keeratan hubungan petani dengan pesantren, norma diukur dari persepsi kepatuhan terhadap kiai, dan kepercayaan diwakili oleh tipe kontrak yang berbeda dalam kaitannya dengan partisipasi terhadap BPLM.

Peubah tersebut kemudian diubah dalam skala nominal (kategori). Jaringan dinilai dari keeratan hubungan petani dengan pesantren yang mencakup santri/wali santri, dan bukan santri/wali santri. Semakin banyak petani yang berstatus santri/alumni/wali murid berarti semakin kuat pemanfaatan jaringan pesantren dalam program BPLM. Norma digambarkan dari persepsi kepatuhan terhadap kiai yang dikategorikan persepsi untuk mendapatkan barokah, dan persepsi untuk mendapatkan pengetahuan tentang ilmu-ilmu Islam atau alasan lainnya. Semakin banyak jumlah petani yang memilih persepsi untuk memperoleh barokah, berarti semakin melembaga norma pesantren. Kepercayaan dinilai dari tipe kontrak yang dikategorikan: kontrak secara informal dan kontrak secara formal. Semakin banyak kontrak dibuat secara informal berarti kepercayaan terhadap petani tinggi (tabel 1). Hubungan partisipasi BPLM terhadap modal sosial diuji dengan statistik *chi-square*.

Tabel 1. Peubah Modal Sosial Pesantren

Peubah	Kategori	
	1	0
keeratan hubungan petani dengan pesantren	santri/wali santri	bukan santri/wali santri
persepsi kepatuhan terhadap kiai	persepsi petani untuk mendapatkan barokah	persepsi petani untuk mendapatkan pengetahuan tentang nilai-nilai islam atau alasan lainnya
tipe kontrak	kontrak secara informal	kontrak secara formal

ANALISIS KINERJA PROGRAM BANTUAN PINJAMAN LANGSUNG MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA PESANTREN DI MADURA Farahdilla Kutsiyati, Muslich Mustadjab, Ratya Anindita, dan Ahmad Erani Yustika

Biaya Transaksi

Biaya transaksi terdiri atas biaya transaksi tetap dan biaya transaksi berubah. Pengukuran biaya transaksi ini diadaptasi dari Collins dan Fabozzi (1991). Persamaannya sebagai berikut

$$BT = BTTT + BTTV$$

BTTT = Biaya komisi + Biaya *transfer fees*

BTTV = Biaya tandingan + Biaya eksekusi

dimana :

BT = Biaya transaksi,

BTTT = Biaya transaksi tetap

BTTV = Biaya transaksi berubah

Sebagai penjelasan, biaya eksekusi dimaknai ongkos yang harus dibayar petani, karena permintaan eksekusi yang dipercepat (akibat kebutuhan adanya likuiditas dan kegiatan perdagangan). Artinya, petani akan mengeluarkan ongkos lebih besar ketika eksekusi dipercepat, sebab dia harus membayar konsesi dari selisih harga aset dengan harga pasar. Biaya tandingan adalah waktu yang harus diluangkan petani agar transaksi terjadi, yang mencakup biaya tandingan mengikuti sosialisasi program BPLM, tandingan waktu pembelian dan tandingan waktu penjualan aset. Biaya ini dihitung dari perkalian antara waktu yang dihabiskan petani untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan upah per jam. Upah per jam diperoleh dari rata-rata upah yang diterima mereka ketika bekerja sebagai buruh tani atau kuli. Biaya komisi berkaitan dengan penggunaan jasa transaksi, seperti makelar, blantik, dan pemegang sapi. Sementara, *transfer fees* berkaitan dengan biaya transportasi, makan-minum, dan retribusi.

Pendapatan

Pendapatan diperoleh dari *gross margin* dikurangi biaya produksi eksplisit dan biaya transaksi. Penghitungannya adalah

$$PDN = GM - BP_{\text{ekplisit}} - BTT$$

dimana :

PDN = Pendapatan

GM = *Gross margin*,

BP_{ekplisit} = Biaya produksi eksplisit,

BTT = Biaya transaksi.

Untuk menguji korelasi biaya transaksi dan modal sosial pesantren terhadap pendapatan digunakan analisis tabulasi silang dan analisis korelasi Pearson dan korelasi Spearman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perspektif Modal Sosial Pesantren bagi Petani

Manfaat pesantren bagi petani adalah tempat mencari ilmu dan memperdalam ilmu agama, tempat memperbaiki moral, serta tempat memperkuat iman. Harapan mereka dengan keberadaan pesantren untuk mendapatkan barokah, alasan patuh terhadap kiai untuk memperoleh barokah dan pemberian sumbangan/infaq ke pesantren juga untuk mendapatkan barokah.

Hasil survei terhadap 131 petani tentang tata nilai dalam mempengaruhi harapan dan keputusannya, mengindikasikan harapan petani terhadap keberadaan pesantren proporsinya 83,8 persen untuk mendapatkan barokah. Disusul untuk mendapatkan ilmu 29 persen, meskipun 22,9 persen responden berharap ilmu dan barokah. Kepatuhan terhadap kiai juga didasari untuk tujuan mendapatkan barokah sebesar 84,5 persen. Lebih menarik lagi di atas 94 persen responden menjawab “selalu patuh” terhadap perintah dan larangan kiai (lihat tabel 2). Persepsi petani bahwa ketidakpatuhan terhadap kiai akan membawa mudharat (celaka) dan kepatuhan akan membawa keberuntungan (barokah) dalam kehidupan seseorang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Madjid (1997) dan Turmudhi (2004) yang mengungkapkan persepsi baik apa pun tentang kiai akan membawa berkah dalam kehidupan seseorang, dan sikap kurang ajar apa pun akan menyebabkan kualat.

Tabel 2. Tata Nilai “Barokah” dalam Mempengaruhi Harapan dan Keputusan Petani, Tahun 2007

Uraian	Jumlah petani	Memperoleh Barokah (%)	Mendapatkan ilmu (%)	Pembangunan pesantren (%)	Lainnya (%)
Harapan terhadap pesantren	130	83,8	23	-	1,54
Alasan patuh terhadap kiai	131	84,5	29	-	0,76
Tujuan pemberian infaq ke pesantren	115	47	-	28,7	24,3

Sudah hal yang lumrah, petani mengunjungi (*silaturahmi*) pesantren antara satu sampai tiga kali pertahun. Mereka biasanya membawa hasil pertaniannya, baik berupa beras, jagung, uang, dan lainnya. Kadangkala petani memberikan uang atau kayu pada saat pesantren membangun pondok dan masjid. Adapun “bungkus” pemberian petani ini, juga didasari harapan untuk mendapatkan barokah.

Seluruh petani menjadikan pesantren sebagai alternatif membantu penyelesaian masalah. Ada hubungan patron-klien antara petani dan kiai, yang didasari oleh dua kelebihan yang dimiliki kiai, yakni dalam aspek pengetahuan

dan aspek kekayaan. Kiai merupakan patron petani yang sebagian besar terilit dalam kemiskinan dan kurang pengetahuan (BPS, dalam Balitbangda, 2007 mencatat jumlah penduduk miskin di lokasi penelitian Kecamatan Pakong dan Palengaan, masing-masing 48,31% dan 58,04%). Bagi orang desa, kiai merupakan guru bagi mereka dan anak-anaknya, orang yang alim, bijaksana, panutan dalam kebaikan, selalu menolong masalah dalam masyarakat, berilmu, dan memberi pekerjaan (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Kepatuhan Terhadap Kiai dan Mengandalkan Pesantren dalam Penyelesaian Masalah, Tahun 2007

Uraian	Jumlah petani	Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah
Kepatuhan terhadap kiai	131	128	5	0
Mengandalkan pesantren dalam penyelesaian masalah	131	22	109	0

Aspek kepercayaan menunjukkan 91 persen petani BPLM melaksanakan kewajiban kontrak. Sisanya 8 persen tidak sepenuhnya mematuhi kesepakatan kontrak, karena yang bersangkutan terburu-buru ingin mendapatkan hasil padahal baru memelihara sapi 2-3 bulan, dan 1 orang menghilangkan aset dengan sengaja (lihat tabel 4).

Tabel 4. Perilaku Petani BPLM Terhadap Kesepakatan Kontrak, Tahun 2007

Perilaku petani	Kepatuhan terhadap kontrak	
	Frekuensi	%
Melaksanakan kewajiban kontrak sepenuhnya	169	91,35
Terburu-buru minta hasil padahal baru dipelihara 2-3 bulan	15	8,11
Menghilangkan aset dengan sengaja	1	0,54

Sumber: Hasil penelitian, diolah (2007).

Jaringan pesantren sangat kuat sekali terutama di pesantren DU. Para alumni di daerah tetap terjalin, meskipun sampai puluhan tahun. Adapun keterikatan ini tetap akan langgeng karena kondisi yang membingkai baik itu atas nama silaturahmi atau secara spesifik pengajian dan kerja sama di bidang ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatan jaringan di pesantren DU sangat jelas dalam program BPLM, diantaranya pemilihan petani dengan cara menawarkan kepada para alumni dan santri.

Jaringan pesantren dalam bentuk pengajian juga sangat intens sekali. Proporsi 61,07 persen petani mengikuti pengajian 1-7 kali dalam seminggu, dan sisanya 38,93 persen menghadiri pengajian satu kali dalam sebulan atau kurang dari satu kali dalam sebulan.

Pemaparan diatas mengindikasikan bahwa ada tiga ciri khas yang dimiliki petani ketika berinteraksi dengan pesantren, yaitu (1) rata-rata niat kuat untuk mendapatkan barokah, (2) ada rasa sungkan – tabu serta penghormatan yang berlebih-lebihan ketika berinteraksi dengan kiai dan keluarganya, dan (3) kecil sekali untuk menipu pesantren.

Berdasarkan gambaran di atas modal sosial pesantren sangat mengakar dalam kehidupan petani yang tinggal di sekitar pesantren. Kondisi ini merefleksikan norma/nilai-nilai yang mendarah daging di lingkup pesantren, dalam kurun waktu lama akhirnya menjadi norma yang melekat terhadap petani. Hal yang sama terbentuk karena jalinan erat yang berlangsung puluhan tahun antara kiai, santri, wali santri, dan petani dengan pola *patronase* dan nilai-nilai yang mengikat diantara mereka akhirnya membentuk jaringan. Artinya, norma, nilai, dan budaya pesantren yang menjadi ciri khas pesantren lambat laun menjadi bagian dari sebagian besar petani dalam bermuamalah. Dampaknya modal sosial pesantren akhirnya menjadi milik sebagian besar petani.

Aturan informal (tidak tertulis) terinternalisasi dalam kehidupan santri dan petani dalam lingkup pesantren tradisional, yakni rata-rata tujuan dasar mereka mendapatkan barokah. Makna barokah yang terangkum dari 131 responden adalah meraih kesempurnaan hidup, keberkahan dunia akherat dan kehidupan yang diridhoi Allah swt, mudah mendapatkan rejeki dan diri selalu merasa cukup serta mudahnya terkabulnya doa-doa. Dapat dikatakan bahwa keyakinan masyarakat terhadap barokah sangat kuat, sehingga tidak mengherankan ketika ada dua pilihan yang ditawarkan antara materi dan barokah, sebagian besar mereka akan memilih barokah, meskipun jika dipandang dari sudut "kepuasan materi" akan merugikan.

Norma yang kedua, yakni kepatuhan terhadap kiai. Ada tiga alasan yang mendasari, *pertama*, budaya patron dengan klien. Seorang patron menurut definisi Scott (1981) adalah orang yang berada dalam posisi membantu klien-kliennya. Meskipun klien-klien seringkali berusaha sebisa-bisanya untuk memberikan arti moral kepada hubungan itu. Oleh karena mereka dalam menghadapi patron seringkali lemah sekali. Gambaran seperti ini nampak sekali terlihat antara interaksi kiai dan petani. Kiai sering memberikan arahan dan pengetahuan tentang keagamaan, memberi bantuan dalam bentuk pinjaman uang serta bantuan-bantuan lain, seperti menghadiri pernikahan, selamatan, menyediakan pekerjaan, atau membantu permasalahan antarmasyarakat. Situasi ini memberi perasaan hutang budi, sehingga mereka berusaha dalam berbagai keadaan membalas kebaikan kiai, seperti sebagian besar petani setiap tahun, satu sampai tiga kali, datang ke pesantren dengan membawa beras, uang, kayu, atau hasil pertanian lainnya. Bentuk balas budi lainnya, mereka seringkali membantu pembangunan pondok/masjid. *Kedua*, keyakinan terhadap barokah kiai. *Ketiga*, kitab-kitab klasik yang merupakan buku ajar dan pola pendidikan di pesantren-pesantren tradisional condong pada penghormatan yang berlebih-lebihan terhadap guru (Farchan & Syarifuddin, 2005). Unsur-unsur tersebut telah memberi kelanggengan ruang interaksi yang tidak simetris antara kiai-santri/masyarakat. Meskipun begitu, sisi positif norma

ini, yakni kiai sangat mudah memobilisasi dan mengarahkan petani dalam pengembangan ekonomi.

Pelaksanaan kontrak program BPLM merupakan wujud kesepakatan antara pesantren (*principal*) dengan petani (*agent*). Kontrak diaplikasikan dengan sistem kontrak tertulis dan tidak tertulis. Isi kontrak mencakup kewajiban, sanksi, lama kontrak, harga sapi, dan insentif yang diterima petani. Dalam tataran pelaksanaan, pesantren menetapkan persyaratan baku yang harus dimiliki para petani diantaranya jujur (tidak pernah bermasalah dalam bermuamalah) dan mempunyai kandang sapi. Sedangkan persyaratan tambahan, tergantung pada kebijakan masing-masing pesantren, seperti pengalaman dan jaringan pesantren.

Di sisi lain, keputusan petani yang nyata mempengaruhi mereka berpartisipasi dalam program BPLM adalah kapasitas kandang, pengalaman dan pendidikan. Hasil analisis logit pada tabel 5 menunjukkan, apabila kapasitas kandang naik 1 persen, akan meningkatkan peluang petani berpartisipasi terhadap BPLM sebesar 7,01 persen. Pengalaman naik 1 persen akan meningkatkan peluang petani berpartisipasi terhadap BPLM sebesar 1,066 persen. Sementara, jika pendidikan lulus SD atau yang lebih tinggi naik satu tingkat akan meningkatkan peluang petani berpartisipasi terhadap BPLM sebesar 4,807 persen.

Tabel 5. Faktor yang Memengaruhi Keputusan Partisipasi Terhadap BPLM

Variabel	Koefisien	Wald	Exp(B)
Konstanta	45,136	0,000	4E+019
Kepemilikan sapi (ekor)	-0,570	0,737	0,565
Sistem bagi hasil (%)	-0,654	0,000	0,520
Kepemilikan lahan (m ²)	0,000	0,017	1,000
Kapasitas kandang (ekor)	1,947***	10,121	7,010
Reputasi petani (1=baik)			
Pengalaman (tahun)	0,064**	3,724	1,066
Jenis kelamin (1=laki-laki)	-16,684	0,000	0,000
Umur (tahun)	-0,018	0,315	0,982
Lama di pondok (tahun)	0,137	1,831	0,872
Anggota keluarga (orang)	0,153	0,574	1,166
Pendidikan (1=lulus ≥SD & bisa membaca)	1,570**	5,694	4,807
Hubungan dengan pesantren	1,194	2,568	3,299

$$\lambda^2_{hitung}=76,708;\alpha=0,000$$

$$-2\log likelihood=84,102$$

$$R^2=0,484$$

Sumber: Hasil Analisis dengan menggunakan SPSS (2008).

***). Nyata pada taraf kesalahan (α) 1%, **). Nyata pada taraf kesalahan (α) 5%,

*)). Nyata pada taraf kesalahan (α) 10%

Semua kontrak di pesantren (DU) dibuat secara formal (tertulis), sedangkan di pesantren Sumber Bungur Pakong (SB) secara informal (lisan). Perbedaan tipe kontrak terkait dengan posisi ketua kelompok dalam struktur sosial pesantren. Di pesantren DU, ketua kelompok adalah orang kepercayaan

kiai, yaitu ustad yang juga merangkap pengurus kegiatan ekonomi pesantren. Pengaruhnya, unsur kehati-hatian sangat tinggi. Ketua kelompok memegang tanggung jawab atas nama pengasuh/kiai, sehingga mengedepankan baik dalam pemilihan petani maupun sistem kontrak menggunakan cara yang paling aman. Dalam pemilihan petani menggunakan para alumni/santri. Dalam aspek kontrak semuanya ditulis secara formal. Sedangkan ketua kelompok di pegang putra kiai di Pesantren SB. Semua kebijakan ditentukan oleh dia sendiri, termasuk bentuk kontrak yang mengedepankan kepercayaan (kontrak informal).

Insentif terhadap petani menganut sistem pola syariah yaitu sistem *mudharabah* (akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola). Sistem insentif seperti ini lebih disukai petani, karena kemudahan dalam pemberian fasilitas kredit. Aplikasinya, seandainya penjualan akan dilakukan sebelum waktunya, maka pesantren akan memberi sejumlah uang sesuai dengan keuntungan dari modal awal. Caranya, sapi dinilai harganya dengan menggunakan jasa penafsir, dan dari tafsiran tersebut, keuntungannya setelah dibagi dua diberikan ke petani. Model seperti ini mempunyai tiga manfaat: (1) petani dapat memperoleh dana segar untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, (2) sapi tetap tidak berpindah ke petani lain, hanya akad harga berubah sesuai dengan kesepakatan akad penjualan yang terakhir, dan (3) biaya eksekusi bisa dibuat seminimal mungkin, dengan mengatur waktu transaksi.

Hubungan Modal Sosial Pesantren terhadap Partisipasi BPLM

Hasil uji *chi square* mengindikasikan bahwa partisipasi terhadap BPLM sangat nyata berhubungan dengan tingkat keeratan hubungan antara petani dan pesantren ($\lambda^2_{hit} = 15,496 > \lambda^2_{0,01} = 6,64$). Sebagian besar (84%) petani non-BPLM berstatus nonsantri/wali santri/alumni dan sisanya berstatus santri/wali santri/alumni. Sementara, petani BPLM hampir separuhnya yaitu 47 persen sebagai santri/wali santri/alumni. Perbedaan ini disebabkan pemilihan petani BPLM (DU) memprioritaskan santri/wali santri/alumni (tabel 6).

Tabel 6. Perbandingan Tingkat Keeratan Hubungan Petani dengan Pesantren Berdasarkan Partisipasi terhadap BPLM, Tahun 2008

Keeratan hubungan petani dengan pesantren	Petani			
	BPLM		Non BPLM	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Santri/wali santri/alumni	34	47	9	16
Bukan santri/wali santri/alumni	39	53	49	84
Total	73	100	58	100

Chi-square = 15,496***

***) Nyata pada taraf kesalahan (α) 1%, **) Nyata pada taraf kesalahan (α) 5%,

*) Nyata pada taraf kesalahan (α) 10%

λ^2 -tabel: $\lambda^2_{(\alpha, df)}$: $\lambda^2_{(0,10,1)}=2,7055$; $\lambda^2_{(0,05,1)}=3,8414$; $\lambda^2_{(0,01,1)}=6,6349$

ANALISIS KINERJA PROGRAM BANTUAN PINJAMAN LANGSUNG MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA PESANTREN DI MADURA Farahdilla Kutsiyati, Muslich Mustadjab, Ratya Anindita, dan Ahmad Erani Yustika

Partisipasi terhadap BPLM sangat nyata berhubungan dengan persepsi yang mendasari kepatuhan petani terhadap kiai ($\lambda^2_{hit} = 18,754 > \lambda^2_{0,01} = 6,64$) (lihat tabel 7 dan 8). Seluruh petani non-BPLM mengedepankan barokah sebagai alasan utama kepatuhan terhadap kiai, sedangkan petani BPLM mengedepankan unsur barokah yang paling dominan (71%), kemudian sisanya bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang nilai-nilai Islam. Perbedaan ini disebabkan juga dari status petani. Jika sang petani sebagai santri, sebagian besar mereka mengedepankan untuk mendapatkan ilmu, sedangkan para petani nonsantri hanya semata-mata untuk memperoleh barokah.

Tabel 7. Perbandingan Persepsi yang Mendasari Kepatuhan Petani Terhadap Kiai Berdasarkan Partisipasi terhadap BPLM, Tahun 2008

Persepsi yang mendasari petani mematuhi kiai	Petani			
	BPLM		Non BPLM	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Barokah	52	71	58	100
Pengetahuan tentang nilai-nilai Islam dan alasan lainnya	21	29	0	0
Total	58	100	58	100

*Chi-square = 18,754****

***). Nyata pada taraf kesalahan (α) 1%, **). Nyata pada taraf kesalahan (α) 5%,

*) Nyata pada taraf kesalahan (α) 10%

λ^2 -tabel: $\lambda^2_{(\alpha, df)}: \lambda^2_{(0,10,1)}=2,7055; \lambda^2_{(0,05,1)}=3,8414; \lambda^2_{(0,01,1)}=6,6349$

Tabel 8. Alasan yang Mendasari Petani Mematuhi Kiai dan Status Petani BPLM dan Petani non-BPLM, Tahun 2007

Persepsi yang mendasari petani mematuhi kiai	Jumlah sampel (n)	%	status
Barokah	20	15,27	Petani BPLM (santri/wali santri/alumni)
	33	25,19	Petani BPLM (nonsantri/wali santri/alumni)
	9	6,87	Petani non BPLM (santri/wali santri/alumni)
	49	37,41	Petani non BPLM (nonsantri/wali santri/alumni)
Pengetahuan tentang nilai-nilai Islam dan alasan lainnya	13	9,92	Petani BPLM (santri/wali santri/alumni)
	7	5,34	Petani BPLM (nonsantri/wali santri/alumni)
Jumlah	131	100,00	

Partisipasi terhadap BPLM sangat nyata berhubungan dengan tipe kontrak ($\lambda^2_{hit} = 24,548 > \lambda^2_{0,01} = 6,64$). Semua kesepakatan petani BPLM (DU) dibuat secara formal (tertulis), yang mencakup harga sapi, tanggung jawab petani (penggaduh) pembagian laba dan sanksi. Sedangkan di pesantren (SB) semua kesepakatan dibuat secara lisan. Sementara untuk petani non-BPLM 46,6 persen memiliki sapi sendiri sehingga tanpa ada kontrak, dan 53,4 persen sebagai penggaduh sapi (bukan milik pesantren), di mana semua kesepakatannya secara lisan, karena pemilik biasanya sangat mengenal petani yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 9 dan 10.

Tabel 9. Tipe Kontrak Petani BPLM dan Petani non-BPLM, Tahun 2007

Tipe kontrak	Jumlah sampel (n)	%	Keterangan
Kontrak formal	25	19,08	Petani BPLM (DU)
Kontrak nonformal	48	36,64	Petani BPLM (SB)
	31	23,67	Petani penggaduh non BPLM
Tanpa ada kontrak	27	20,61	Milik sendiri
Jumlah	131	100	

Tabel 10. Perbandingan Tipe Kontrak Berdasarkan Partisipasi terhadap BPLM, Tahun 2008

Tipe kontrak	Petani			
	BPLM		non BPLM	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Kontrak secara non formal	48	66	58	100
Kontrak secara formal	25	34	0	0
Total	73	100	58	100

Chi-square = 24,548***

***). Nyata pada taraf kesalahan (α) 1%, **). Nyata pada taraf kesalahan (α) 5%,

*) Nyata pada taraf kesalahan (α) 10%

λ^2 -tabel: $\lambda^2_{(\alpha, df)}$: $\lambda^2_{(0,10,1)}=2,7055$; $\lambda^2_{(0,05,1)}=3,8414$; $\lambda^2_{(0,01,1)}=6,6349$

Biaya Transaksi

Tabel 11 mengindikasikan bahwa proporsi rataan biaya transaksi tetap, biaya eksekusi pembelian, biaya eksekusi penjualan, dan biaya tandingan secara berurutan Rp 89.427, Rp 136.832, Rp 228.816, dan Rp 51.045. Perbandingannya masing-masing adalah 1,75; 2,68; 4,48; dan 1. Hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa biaya eksekusi memberikan kontribusi paling tinggi terhadap total biaya transaksi, kemudian disusul biaya transaksi tetap, dan biaya tandingan.

ANALISIS KINERJA PROGRAM BANTUAN PINJAMAN LANGSUNG MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA PESANTREN DI MADURA Farahdilla Kutsiyati, Muslich Mustadjab, Ratiya Anindita, dan Ahmad Erani Yustika

Tabel 11. Biaya Transaksi Usahatani Sapi Potong, Tahun 2007

Peubah	Jumlah sampel (n)	Nilai (Rp)			Standart deviasi
		Rataan	minimum	maksimum	
Biaya transaksi	131	506.122	62.000	1.412.000	332.876
1. Biaya transaksi tetap	131	89.427	22500	235.000	50.496
a. Komisi		29.671	0	100.000	21.892
b. <i>Transfer fees</i>		57.083	0	150.000	34.837
c. Komisi & <i>tranfer fees</i> kegagalan transaksi		2.671	0	50.000	11.288
2. Biaya transaksi variabel	131	416.694	36.000	1.386.000	324.079
a. Oportunitas		51.045	36.000	63.000	13.462
(1) Mengikuti sosialisasi BPLM		15.045	0	27.000	13462
(2) Waktu pembelian		18.000	18.000	18.000	0
(3) Waktu penjualan		18.000	18.000	18.000	0
b. Eksekusi		365.648	0	1.350.000	328.506
(1) Biaya eksekusi pembelian		136.832	0	600.000	183.929
(2) Biaya eksekusi penjualan		228.816	0	900.000	251.619

Perbandingan Biaya Transaksi Petani BPLM dan Petani non-BPLM

Hasil analisis uji-*t* menunjukkan biaya transaksi petani BPLM (SB) sangat nyata lebih rendah ($P < 0,01$) dibandingkan petani non-BPLM. Sementara, biaya transaksi petani BPLM (DU) sangat nyata lebih tinggi ($P < 0,01$) dibandingkan petani non-BPLM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12, yang memperlihatkan efisiensi kelembagaan (biaya transaksi) petani BPLM di SB lebih efisien, baik dari kelembagaan petani non-BPLM dan kelembagaan petani BPLM di DU. Namun, kelembagaan petani non-BPLM lebih efisien dari kelembagaan petani BPLM di DU.

Tabel 12. Biaya Transaksi Petani BPLM dan Petani Non BPLM, Tahun 2007

Peubah	Petani BPLM (SB) (n=48)	Petani BPLM (DU) (n=25)	Petani non BPLM (n=58)	Uji t		
				Petani BPLM (DU) Vs Petani non BPLM	Petani BPLM (DU) Vs Petani BPLM (SB)	Petani BPLM (SB) Vs non BPLM
Biaya transaksi (Rp)	285.093	730.760	592.215	1,748*	10,041***	6,028***
Biaya transaksi tetap (Rp)	81.468	165.760	63.112	13,115***	9,805***	2,863***
Biaya oportunitas (Rp)	63.000	63.000	36.000			
Biaya eksekusi (Rp)	140.625	502.000	493.103	0,113	8,142***	5,521***

***). Nyata pada taraf kesalahan (α) 1%, **). Nyata pada taraf kesalahan (α) 5%,

*) Nyata pada taraf kesalahan (α) 10%

Faktor-faktor yang menyebabkan biaya transaksi total petani BPLM (DU) tinggi adalah:

- a. Biaya eksekusi tinggi terutama biaya eksekusi penjualan. Penjualan sapi dilaksanakan hampir seluruhnya pada saat harga di pasaran mengalami penurunan. Tindakan ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi kerugian yang lebih besar karena kegagalan pemeliharaan, sehingga pelaksanaan penjualan dipercepat. Mengutip Collins dan Fabozzi (1991), biaya eksekusi meningkat karena permintaan eksekusi yang dipercepat. Permintaan eksekusi yang dipercepat merupakan refleksi dari kebutuhan likuiditas (*liquidity*) dan aktivitas perdagangan (*trading activity*).
- b. Pemilihan petani mengutamakan para alumni/santri (jaringan), konsekuensinya penempatan sapi tidak terkonsentrasi dalam satu kecamatan, tetapi tersebar di luar kecamatan tempat pesantren tersebut berada, bahkan di luar wilayah Kabupaten Pamekasan, sehingga menyulitkan monitoring dan koordinasi.
- c. Pengalaman petani dalam mengelola sapi kurang. Dari 25 contoh yang terpilih, 9 orang tidak memiliki pengalaman sama sekali, dan 9 orang hanya mempunyai pengalaman 1 tahun. Faktor ini pun disebabkan pemilihan petani memprioritaskan para alumni/santri.
- d. Sebagian besar dana BPLM turun pada akhir tahun. Pada waktu tersebut harga sapi mengalami kenaikan. Di sisi lain, pemerintah menuntut pesantren agar pembelian dilaksanakan secepatnya, dan memaksa untuk sesegara mungkin menyelesaikan persyaratan administrasi sebelum tutup tahun. Kondisi ini agak berbeda jika dibandingkan pelaksanaannya di pesantren SB (lihat tabel 6). Meskipun dinas peternakan menekan secepat mungkin laporan pertanggungjawaban selesai, tetapi ketua kelompoknya mengedepankan diplomasi terhadap instansi terkait, sehingga ada dispensasi penundaan. Di samping itu, penyaluran dana tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap yakni pada akhir tahun dan awal tahun.
- e. Ketua kelompok sangat berhati-hati dan kurang pengalaman dalam pengelolaan sapi di tingkat petani, sehingga melakukan beberapa kekeliruan, diantaranya: petani yang terpilih banyak yang tidak kompeten dalam pemeliharaan sapi, radius penempatan sapi berjauhan, dan performan sapi yang terpilih kualitasnya tidak bagus. Sungguhpun begitu, mulai permulaan tahun kedua, pesantren DU menyasiasi masalah-masalah yang muncul dalam kurun waktu berlangsungnya program ini dengan cara: (1) *Merevolving* semua sapi madura menjadi sapi bangsa nonmadura jantan. Penggantian ini tidak serta merta dilakukan, tetapi berdasarkan banyaknya permintaan dan keluhan petani. Sebenarnya faktor yang merangsang tindakan tersebut, karena tingkat keuntungan jauh lebih tinggi dibandingkan sapi madura serta cara pemeliharaannya mudah, meskipun konsumsi pakan sapi nonmadura 2-3 lebih banyak; (2) Mengganti petani yang tidak

berkompeten dalam pemeliharaan sapi; (3) Memindahkan sapi yang letaknya jauh dari pesantren; (4) Pesantren memberi pinjaman selayaknya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas rumah tangga petani.

Sebaliknya, biaya transaksi petani BPLM SB rendah karena (1) Pesantren mengkompensasi kebutuhan likuiditas petani, sehingga mereka tidak terdesak untuk mempercepat penjualan. Aplikasinya, seandainya penjualan dilakukan sebelum waktunya, maka pesantren akan memberi sejumlah uang sesuai dengan keuntungan dari modal awal. Caranya sapi dinilai harganya dengan menggunakan jasa penaksir nilai, dan dari taksiran tersebut, keuntungannya setelah dibagi dua diberikan. Model ini dapat menekan seminimal mungkin biaya eksekusi; (2) Manajemen dalam pemilihan petani mengedepankan pengalaman dan reputasi, lokasi hanya terkonsentrasi pada lima desa yang paling dekat dengan pesantren, ketua kelompok memberi wewenang penuh, terhadap orang-orang kepercayaannya di tiap-tiap desa dalam pemilihan petani, pengawasan dan koordinasi; (3) Biaya *transfer fee* dan komisi lebih rendah, karena jarak pasar lebih dekat dan jumlah penggunaan jasa transaksi lebih sedikit.

Sementara, faktor yang menyebabkan biaya transaksi petani non-BPLM cukup tinggi: (1) Pendapatan petani umumnya rendah. Mereka sering terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk keperluan biaya tanam, terutama pada saat musim tanam tembakau, sehingga terkadang sapi dijual pada saat harga di pasaran turun; (2) Keterbatasan hijauan pakan pada saat musim kemarau, yang memaksa mereka untuk membeli pakan tambahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya biaya transaksi tergantung pada operasional kelembagaan masing-masing pesantren, yang disebabkan oleh perbedaan struktur tata kelola, perilaku petani/ketua kelompok, jaringan pesantren dan ketidakpastian (cuaca atau ketersediaan pakan).

Analisis Usaha Tani Sapi Potong

Analisis usaha tani sapi potong dalam bahasan ini, “tidak memasukkan petani BPLM (DU)”. Faktor yang menjadi penyebabnya: (1) Penelitian dilaksanakan pada pertengahan tahun kedua. Pada saat itu sapi yang dipelihara diganti seluruhnya dari bangsa sapi madura menjadi sapi nonmadura (persilangan, sapi *exotic*), dengan pergantian bangsa sapi, maka data biaya transaksi sapi nonmadura hanya diperoleh pada saat pembelian, sedangkan transaksi penjualan belum dilakukan pada saat penelitian; (2) Penjualan sapi nonmadura belum dilaksanakan sehingga belum diketahui tingkat pendapatan yang diperoleh.

Tabel 13 mengindikasikan rata-rata pendapatan Rp 1.228.552, pendapatan minimum Rp -1.152.000 dan pendapatan maksimum Rp 4.828.000. Hasil ini menunjukkan (1) kisaran pendapatan tertinggi dengan pendapatan

terendah sangat jauh. Hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh lama pemeliharaan. Jika jangka waktu pemeliharaan hanya 3 bulan, cenderung pendapatannya sangat rendah, karena harus menutupi biaya transaksi dan biaya adaptasi ternak; (2) Pendapatan petani sangat rendah. Faktor penyebabnya tidak terlepas dari karakteristik bangsa sapi madura. *Pertama*, penambahan bobot badan harian (PBBH) sapi madura sangat rendah. Soetanto (2000) menyebutkan bahwa PBBH pra dan pascasapih sapi madura sekitar 0,2-0,4 kg/ekor/hari. Hasil yang hampir sama dikemukakan Harmadji (1992) bahwa PBBH sapi jantan umur 6 bulan sampai 3 tahun berkisar 0,22-0,4 kg/ekor/hari, untuk sapi betina 0,3-0,32 kg/ekor/hari. *Kedua*, interval jarak beranak sapi madura di pulau Madura kurang efisien, karena jarak waktu antara beranak sampai dengan saat bunting kembali butuh waktu lama (Ma'sum *et al.*, 1992). *Ketiga*, faktor manajemen pemeliharaan kurang memadai.

Tabel 13. Pendapatan Petani, Tahun 2007

Peubah	Jumlah sampel	Rataan	minimum	maksimum	Simpangan baku
Lama pemeliharaan (bulan)	105	13,43	2,00	36	7,22
Biaya transaksi (Rp)	105	453.141	62.000	1.412.000	338373,080
<i>Gross margin</i> (Rp)	105	1.893.952	0	5.900.000	1131180,181
Biaya produksi eksplisit (Rp)	105	208.819	10.000	810.000	152722,129
Pendapatan (Rp)	105	1.228.552	-1.152.000	4.828.000	1199899,3

Rataan pemeliharaan sapi 13,4 bulan dengan kisaran paling minimum 2 bulan dan paling lama 36 bulan. Lama pemeliharaan ini sangat mempengaruhi pendapatan karena pemeliharaan dengan rentang waktu pendek, yakni 2-3 bulan, petani harus mengkompensasi biaya transaksi dan biaya adaptasi ternak. Perlu ditegaskan bahwa sapi yang dipelihara petani hampir 80 persen sapi betina bibit dan bukan sapi jantan penggemukan. Ditambah lagi sebagian besar sapi yang dibeli kisaran umurnya \pm 2 tahun. Jadi, masih dalam masa pertumbuhan.

Lebih jauh tabel 14 menunjukkan pendapatan petani BPLM (SB) sangat nyata lebih tinggi daripada petani non-BPLM, dengan rata-rata Rp 1.620.839 banding Rp 898.206. Hal ini disebabkan biaya transaksi petani non-BPLM per bulan cukup tinggi dan *gross margin* lebih rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya *gross margin* adalah kelahiran jumlah anak sapi petani non-BPLM lebih rendah dibandingkan petani BPLM, padahal lama pemeliharaan keduanya tidak berbeda nyata (14,19 vs 12,79 bulan). Sebagai penjelasan, bahwa harga anak diasumsikan sama Rp 1.800.000 per ekor. Sementara faktor yang menyebabkan biaya transaksi petani non-BPLM lebih tinggi dibandingkan petani BPLM sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Tabel 14. Perbandingan Pendapatan Petani BPLM (SB) vs Petani Non-BPLM, Tahun 2008

Peubah	Jumlah contoh	Rataan	Petani BPLM	Petani non-BPLM	uji <i>t</i>
(I). GROSS MARGIN (Rp)	105				
a. Harga pembelian sapi (Rp)		2.365.524	2.344.896	2.382.895	0,334
b. Harga penjualan sapi (Rp)		3.442.190	3.507.917	3.386.842	0,759
c. Jumlah anak sapi (ekor)		0,16	0,23	,10	1,765*
d. Harga jual anak sapi (Rp)		288.679	412.500	186.207	1,765*
e. Pendapatan eksekusi (Rp)		522.406	540.104	507.759	,522
(b-a) + (c x d) + e		1.893.952	2.134.688	1.691.228	2,031**
(II). BIAYA PRODUKSI (Rp)	105				
(II.1). Biaya Produksi Total					
f. Biaya pakan hijauan (Rp)		198.120	187.445	208.421	2,819***
g. Biaya pakan konsentrat (Rp)		16.366	19.145	14.026	2,656***
h. Biaya kesehatan ternak (Rp)		14.338	14.968	13.807	0,893
i. Biaya kawin suntik (Rp)		310	408	230	1,327
j. Biaya alat (Rp)		218.25	21.788	21.857	0,063
k. Lama pemeliharaan (bulan)		13,43	14,187	12,789	0,988
(f + g + h + i + j) x k		3.500.399	3.637.964	3.389.383	0,582
(II.2). Biaya Produksi Eksplicit					
$\frac{1}{2} (g + h) \times k$		208.819	228.755	192.031	1,231
(III). BIAYA TRANSAKSI (Rp)	105				
l. Biaya transaksi tetap (Rp)		71.425	81.468	63.112	2,863***
m. Biaya oportunitas (Rp)		48.226	63.000	36.000	
n. Biaya eksekusi (Rp)		333.491	140.625	493.103	5,521***
(l + m + n)		453.141	285.094	592.216	5,195***
(IV). PENDAPATAN (Rp)	105				
(I) - (II.2) - (III)		1.228.552	1.620.839	898.206	3,209***

***). Nyata pada taraf kesalahan (α) 1%, **). Nyata pada taraf kesalahan (α) 5%,*) Nyata pada taraf kesalahan (α) 10%

Hasil analisis korelasi antara biaya transaksi dengan pendapatan petani menunjukkan hubungan di antara keduanya kuat dan negatif ($r = -0,616$). Ini berarti, kenaikan biaya transaksi akan diikuti penurunan secara nyata pendapatan petani. Sedangkan hasil tabulasi silang mengindikasikan keeratan hubungan petani dengan pesantren, kepatuhan terhadap kiai dan tipe kontrak dengan pendapatan, masing-masing mempunyai angka korelasi yang lemah (jauh dibawah 1) dan mempunyai peluang yang jauh diatas 10 persen.

KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial pesantren adalah tata nilai barokah, kepatuhan, jujur, dan jaringan yang solid antara petani dan pesantren. Modal sosial tersebut mengakar dalam kehidupan petani dan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ekonomi pesantren. Sementara, biaya transaksi petani dalam pelaksanaan BPLM tergantung pada operasional

kelembagaan masing-masing pesantren, yang disebabkan oleh perbedaan struktur tata kelola, perilaku petani/ketua kelompok, jaringan pesantren, dan ketidakpastian. Biaya eksekusi memberi kontribusi yang paling tinggi terhadap total biaya transaksi. Kenaikan biaya transaksi ini akan diikuti dengan penurunan secara nyata pendapatan petani.

Saran dari hasil penelitian ini adalah: (1) Lembaga keuangan mikro syariah pesantren sebaiknya memberi pinjaman bagi petani, untuk keperluan input dan kebutuhan lainnya yang sangat mendesak, dengan cara memberi lebih awal keuntungan bagi hasil dari pemeliharaan sapi. Tindakan ini dapat meminimumkan biaya transaksi; (2) Pemerintah sebaiknya menyediakan fasilitas kredit yang mengarah kepada petani, khususnya petani kecil. Mereka seringkali kesulitan mendapat pinjaman untuk menutupi likuiditas usaha rumah tangganya, sehingga mereka terpaksa mempercepat penjualan, meskipun pada saat harga di pasaran sangat rendah dan kadangkala pada saat performan sapi masih belum waktunya dijual; (3) Bantuan pemerintah sebaiknya tidak menuntut pesantren untuk secepatnya membeli sapi dengan rentang waktu yang sangat pendek, karena pembelian yang dipercepat akan meningkatkan biaya transaksi; (4) Pesantren dapat memanfaatkan modal sosial yang berdampak positif bagi pengembangan ekonomi, diantaranya mengedepankan kejujuran dan amanah dalam bertransaksi, dan kiai menggunakan pengaruhnya dengan jalan memobilisasi petani dalam pengembangan ekonomi; (5) Pemilihan petani sebaiknya tidak mengedepankan alumni/santri, tetapi mengutamakan pengalaman, kepemilikan kandang sapi, reputasi baik dalam masyarakat, dan tinggal di sekitar pesantren; (6) Pesantren dapat menjadi fasilitator pemerintah atau pelaku aktif dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan dengan urun rembug dalam program pembangunan pemerintah. Karena keberadaan lembaga ini dapat mengurangi biaya transaksi petani dengan cara memberi bantuan dalam bentuk pinjaman dana ataupun input. Di samping itu, dengan modal sosial yang dimilikinya dapat mengurangi perilaku oportunistis petani; (7) Petani sebaiknya membentuk atau bergabung dalam suatu kelompok tani, karena keanggotaan dalam suatu kelompok akan lebih mudah mendapatkan akses informasi dan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, L. Trijono, dan Susetiawan. 2002. Konflik antara Pemerintah dan Komunitas Ulama dalam Pengembangan Objek Wisata. *Sosiohumanika*. Vol, 15(3), Penelitian Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora, Universitas Gadjah Mada.
- Billah. 1985. *Pikiran Awal Pengembangan Pesantren*. Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah. Cetakan Pertama. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Jakarta.
- Bisnis Indonesia. 2007. Dana Penguatan Koperasi & UKM Rp. 713,96 Miliar. *Bisnis Indonesia*. Selasa, 10 April. 2007.

ANALISIS KINERJA PROGRAM BANTUAN PINJAMAN LANGSUNG MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA PESANTREN DI MADURA Farahdilla Kutsiyati, Muslich Mustadjab, Ratya Anindita, dan Ahmad Erani Yustika

- Chaplin, D. 1999. Social Capital and the Privatization of Public Goods. *International Journal of Social Economics*, Vol 26 No.10/11. MCB University Press.
- Coase, R. H. 1998. *The Firm, the Market and the Law*. University of Chicago Press. Chicago.
- Coase, R. H. 2000. *The New Institutional Economics. Institutions, Contract and Organizations: Perspective from New Institutional Economics*. Edward Elgar. Cheltenham.
- Collins, B. M., and F. J. Fabozzi. 1991. A Methodology for Measuring Transaction Costs. *Financial Analysts Journal*. March-April.
- Depag. 2004a. *Pengembangan Agrobisnis di Pondok Pesantren: Pedoman dan Langkah-Langkah Pengembangan*. Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Departemen Agama RI. Jakarta.
- Depag. 2004b. *Potensi Ekonomi Pondok Pesantren di Indonesia*. Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta.
- Deptan. 2006. *Rancangan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Berwawasan Agribisnis Tahun 2006*. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Deptan-UB. 2004. *Kajian dan Pemetaan Pengembangan Agribisnis Peternakan Model Bantuan Usaha Ekonomi Produktif*. Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian Bekerja sama dengan Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang.
- Dhofier, Z. 1983. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Jakarta.
- Farchan, H., dan Syarifudin. 2005. *Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren*. Pilar Religia, Kelompok Pilar Media. Yogyakarta
- Fukuyama, F. 2002. *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Ruslani (Penerjemah). Qalam. Yogyakarta.
- Furubotn, E. and R. Richter. 2000. *Institutions and Economic Theory: the Contribution of the New Institutional Economics*. Ann Arbor, The University of Michigan Press. Michigan.
- Ghazali, B. 2001. *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan, Kasus Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, Madura*. Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta.
- Harmadji. 1992. *Prospek Pengembangan Sapi Madura*. Proceedings Pertemuan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sapi Madura. Badan Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Isham, J., T. Kelly and S. Ramaswamy. 2002. *Social Capital and Well-being in Developing Countries: An Introduction*. *Social Capital and Economic Development: Well-being in Developing Countries*. Edward Elgar. Cheltenham and Northampton.

- Kompas. 2004. Ponpes Diharapkan jadi Kekuatan Ekonomi yang Mandiri. Kompas, 16 Juni. 2004.
- Kunio, Y. 2000. *Asia Per Capita: Why National Incomes Differ in East Asia*. Curzon Press London and New Asian Library Singapore.
- Kutsiyah, F. 2008. *Kelembagaan Ekonomi Pesantren: Pemberdayaan dan Strategi Pengembangannya di Kabupaten Pamekasan*. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pamekasan. Pamekasan.
- Lapavitsas, C. and B. Fine. 2004. *Social Capital and Capitalist Economies*. ASECU South Eastern Europe Journal of Economics.1.
- Lin, N. 2001. *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Luqman, M. 2003. *Pesantren Vis A Vis Tafsir Penguasa*. Menggagas Pesantren Masa Depan. Qirtas, Qalam. Yogyakarta.
- Ma'sum dan Komarudin. 1992. Hasil–Hasil Penelitian Sapi Madura di Sub Balai Penelitian Ternak Grati - Pasuruan. *Proceedings Pertemuan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sapi Madura*. Badan Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Jakarta.
- Madjid, N. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren*. Paramadina. Jakarta.
- Milgrom, P. and J. Robert.1992. *Economics, Organization, and Management*. Prentice Hall, Englewood Cliffs. New Jersey.
- Minten, B. and M. Fafchamps. 1999. *Social Capital and The Firm: Evidence from Agricultural Trade*. Working Paper No. 21, The World Bank, Social Capital Initiatives. Washington, DC.
- North, D. C. 1987. *Institutions, Transaction Cost and Economic Growth Economic Inquiry*. Vol 25. 1987.
- Portes, A. 1998. *Social Capital : Its Origin and Applications in Modern Sociology*. Annual Review Sociology, Vol. 24, 1998.
- Rahardjo, D. M. 1988. *Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan*. Pesantren dan Pembaharuan. Cetakan Keempat, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta.
- Ridwan, K. 2005. *Ada Ketidakadilan terhadap Pesantren*. Wawancara, Dialog Jumat, 23 Desember 2005. Tabloid Republika. Jakarta.
- Ritzer, G. dan Douglas J.G. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Keenam. Alimandan (Penerjemah). Prenada Media. Jakarta.
- Schramm, M. 2002. *Bounded Rationality and Opportunism-Behavioural Assumption of TCA Revisited*. Doktoranden-Seminar. Institut fur Agrarökonomie Platz der Gottinger Sieben 5 37073. Gottingen.
- Scott, J. C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Hasan Basri (Penerjemah). Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Jakarta.
- Sen, A. 1999. *Development as Freedom*. Anchor Books, a division of Random House, Inc. New York.

- Sen, A. 2007. Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas. Arif Susanto (Penerjemah). Marjin kiri. Jakarta.
- Soetanto, H. 2000. Masalah Gizi dan Produktivitas Ternak Ruminansia di Indonesia: Peluang dan Kendala Mewujudkan Swasembada Daging 2005. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Gizi Ruminansia. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang.
- Streeten, P. 2002. Reflection on Social and Antisocial Capital. *Social Capital and Economic Development: Well-being in Developing Countries*. Edward Elgar. Cheltenham and Northampton.
- Syahyuti. 1999. Penelusuran Aspek Ekonomi pada Pondok Pesantren dan Peluang Pengembangannya. *Forum Agro Ekonomi*, Volume 17 No. 2, Desember 1999.
- Turmudi, E. 2004. Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan. Supriyanto Abdi (Penerjemah). LKiS. Yogyakarta.
- Van den Berg. 2001. *Economic Growth and Development: An Analysis of Our Greatest Economic Achievements and Our Most Exciting Challenges*. McGraw-Hill/Irwin., Singapore.
- Wahid, A. 1988. Pesantren sebagai Subkultur. *Pesantren dan Pembaharuan*. Cetakan Ke empat. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta.
- Wallis, J., P. Killerby, and B. Dollery. 2004. *Social Economics and Social Capital*. *International Journal of Social Economics*. Vol 31 No.3, 2004. Emerald Group Publishing Limited.
- Williamson, O.E. 1985. *The Economic Institutions of Capitalism. Firm, Market, Relational Contracting*. The Free Press. A Division of Maxmillan, Inc. New York.
- Williamson, O.E. 1990. *Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations*. *Industrial Organization*. An Elgar Critical Writing Reader. Cheltenham, UK.
- Woolcock, M. 2002. *Social Capital in Theory and Practice: Where Do We Stand?*. *Social Capital and Economic Development: Well-being in Developing Countries*. Edward Elgar. Cheltenham, UK and Northampton, USA.
- Yeager, T.J. 1999. *Institutions, Transition Economies and Economic Development*. Westview Press, a Member of the Perseus Books Group.